

BAB II
GAMBARAN UMUM
PDI PERJUANGAN DI KOTA SEMARANG

2.1. Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1. Profil Kota Semarang

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang berperan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, dan budaya di kawasan Pantura. Kota Semarang memiliki luas wilayah sekitar 373,70 km², Kota Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Kota ini menjadi simpul penting dalam sistem logistik nasional dikarenakan memiliki akses yang strategis, yakni jalur tol Trans Jawa sebagai jalur darat, pelabuhan Tanjung Emas sebagai jalur laut, dan Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani sebagai jalur udara.

Dalam segi pembangunan, Kota Semarang dikenal sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia yang menunjukkan pertumbuhan pesat, terutama dalam sektor industri dan jasa. Hal ini dikarenakan lokasi Kota Semarang yang strategis dengan empat pintu gerbang, yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur, dan koridor barat. Tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi regional, Kota Semarang juga memainkan peran penting dalam dinamika politik, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Termasuk salah satunya dalam kontestasi pemilu legislatif.

Kota Semarang dipimpin oleh Dr. Agustina Wilujeng Pramestusi, SS., MM. sebagai walikota dan Ir. H. Iswar Aminuddin, M.T. sebagai wakil walikota. Pasangan walikota dan wakil walikota tersebut terpilih untuk mengemban jabatan periode 2025-2030. Dalam menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan publik, menurut RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029, Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi

Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika.

2. Misi

- a. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial.
- b. Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila.
- c. Manajemen Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan.
- d. Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Kemajuan Kota.

- e. Menjalankan Reformasi Birokrasi secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan misi tersebut, Kota Semarang telah maju digitalisasi akses dan informasi, guna memberikan pelayanan yang mudah dan efisien. Berbagai informasi dapat diakses melalui *website* <https://semarangkota.go.id/>. Selain itu, dapat diakses pula media sosial official milik Kota Semarang di *instagram* @pemerintahkotasemarang, *twitter* @humaspemkotsmg, dan kanal *youtube* Semarang Pemkot.

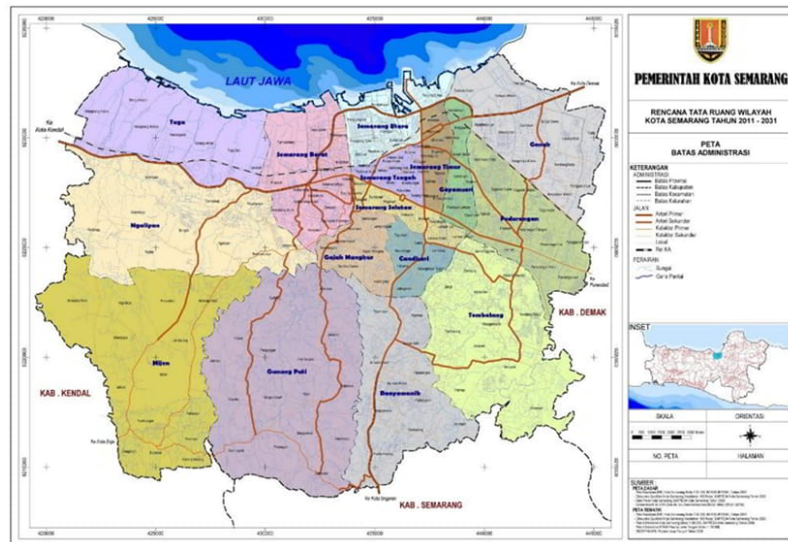
2.1.2. Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang berada di tengah-tengah Pulau Jawa yang secara geografis terletak antara garis 6°50' – 7°10' Lintang Selatan dan garis 109°35' – 110°50' Bujur Timur. Kota ini memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km² dan merupakan 1,15% dari total daratan Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang berbatasan wilayah langsung dengan daerah-daerah di sekitarnya. Batas-batas wilayah administrasi Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Sebelah barat | : Kabupaten Kendal |
| 2. Sebelah timur | : Kabupaten Demak |
| 3. Sebelah selatan | : Kabupaten Semarang |
| 4. Sebelah utara | : Laut Jawa |

Adapun peta administratif Kota Semarang adalah sebagai berikut:

Gambar 3. Peta Administratif Kota Semarang



Sumber: Pemerintah Kota Semarang, Tahun 2024

Kondisi topografi bervariasi dengan elevasi yang berada pada ketinggian antara 0,75 meter sampai 348 meter di atas permukaan laut. Kota Semarang memiliki karakter unik dengan bentang alam yang terdiri dari kawasan pesisir, dataran rendah, hingga perbukitan. Bagian utara Kota Semarang terdiri dari kawasan pesisir dan dataran rendah yang meliputi beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara dan Genuk dengan ketinggian antara 0,75 sampai 90,56 mdpl. Dataran rendah ini biasa disebut dengan sebutan Semarang Bawah. Di Semarang Bawah ini, pusat pemerintahan dan perdagangan berlokasi. Sarana prasarana vital juga berlokasi di sini. Sedangkan daerah selatan merupakan daerah perbukitan, dengan kondisi geomorfologi Kota Semarang yang semakin ke selatan semakin tinggi ini, kawasan perbukitan sering disebut dengan sebutan Semarang Atas. Daerah ini memiliki ketinggian antara 90,56-348 mdpl.

Adapun kecamatan yang tergabung meliputi Kecamatan Mijen, Gunungpati, Banyumanik, dan Tembalang.

2.1.3. Kondisi Demografis Kota Semarang

Populasi penduduk Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebesar 1.694,74 ribu jiwa penduduk. Jumlah penduduk terbanyak ada di Kecamatan Tembalang dan terkecil di Kecamatan Tugu. Secara detail, jumlah penduduk Kota Semarang adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Semarang

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Pendudukan
1.	Mijen	89.95	1.591,35
2.	Gunungpati	100.75	1.729,00
3.	Banyumanik	143.43	4.822,53
4.	Gajahmungkur	56.35	6.030,73
5.	Semarang Selatan	62.18	10.456,73
6.	Candisari	75.61	11.820,08
7.	Tembalang	198.86	5.038,38
8.	Pedurungan	196.53	9.309,77
9.	Genuk	132.47	5.099,22
10.	Gayamsari	70.61	11.319,94
11.	Semarang Timur	66.48	12.261,64
12.	Semarang Utara	117.89	10.347,60
13.	Semarang Tengah	55.21	10.672,11
14.	Semarang Barat	149.33	6.888,81
15.	Tugu	33.80	1.201,59
16.	Ngaliyan	145.50	3.384,58

Sumber: Kota Semarang Dalam Angka 2024

Komposisi penduduk didominasi oleh usia produktif, yakni usia 15-64 tahun yang menurut data BPS Kota Semarang berjumlah lebih dari 70% total populasi. Ini merupakan modal penting dalam pembangunan dan partisipasi politik, karena sebagian besar pemilih berasal dari kelompok ini. Di sisi lain, mayoritas penduduk adalah etnis Jawa. Berdampingan dengan komunitas Tionghoa, Arab, Batak, dan etnis lainnya yang hidup berdampingan secara harmonis. Terkait tingkat pendidikan, penduduk Kota Semarang tergolong tinggi, dengan mayoritas telah menyelesaikan pendidikan hingga SMA, dan sebagian memiliki akses terhadap pendidikan tinggi.

Tabel 3. Penduduk Kota Semarang menurut Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk (dalam persen)
1.	Tidak Sekolah	27,04
2.	Tidak Tamat SD	13,28
3.	Tamat SD	5,76
4.	Tamat SMP	12,23
5.	Tamat SMA	30,792
6.	Tamat Strata 1	9,84
7.	Tamat Strata 2	0,99
8.	Tamat Strata 3	0,068
Jumlah		100,00

Sumber: BPS Kota Semarang, 2023

Hal tersebut membentuk wajah politik Kota Semarang yang kompleks, tingkat pendidikan yang tinggi menjadikan masyarakat Kota Semarang memiliki kesadaran politik dan partisipasi elektoral yang cukup baik, serta kecenderungan untuk lebih rasional dan kritis dalam memilih wakil rakyat. Dari sudut pandang

ekonomi, sebagian besar penduduk Kota Semarang bekerja di sektor jasa, perdagangan, dan industri yang mencerminkan struktur ekonomi urban. Kondisi demografis yang beragam dan didominasi oleh kelompok usia produktif memberikan potensi besar bagi partisipasi politik, termasuk menciptakan iklim demokrasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu representasi, termasuk keterwakilan perempuan di parlemen. Namun, di sisi lain, tantangan tetap hadir baik secara struktural, maupun kultural.

2.2. Dinamika Politik PDI-Perjuangan di Kota Semarang

PDI Perjuangan merupakan salah satu partai politik di Indonesia yang semula dimulai dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Ir. Soekarno. Partai ini kemudian bergabung dengan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katolik. Partai gabungan tersebut kemudian dinamakan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973. Dalam keberjalanannya, partai ini mengalami dinamika internal yang sangat kuat, sehingga terjadi dua *power* yang berkuasa. Peristiwa tersebut dinamakan Peristiwa Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli). Partai ini diketuai oleh Megawati Soekarno Putri sejak 1998, dan diganti namanya oleh Megawati menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) pada 1 Februari 1999.

PDI Perjuangan di Kota Semarang merupakan perpanjangan dari struktur partai di tingkat nasional yang memiliki pengaruh kuat dalam dinamika politik daerah. Sebagai partai yang secara historis memiliki basis ideologi marhaenisme dan kedekatan dengan rakyat kecil, PDI Perjuangan mengonsolidasikan

kekuatannya di tingkat lokal, terutama melalui struktur kepartaian hingga tingkat akar rumput. Struktur organisasi PDI Perjuangan di Kota Semarang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sebagai kepengurusan utama di tingkat kota, yang membawahi Pimpinan Anak Cabang (PAC) di tingkat kecamatan, serta ranting dan anak ranting di tingkat kelurahan dan RW. Kekuatan struktural ini yang menjadi tulang punggung mobilisasi massa dan distribusi informasi politik. DPC PDI Perjuangan Kota Semarang dipimpin oleh Hendrar Prihadi, S. E., M. M. Dengan 13 wakil ketua di berbagai bidang, antara lain bidang kehormatan partai, kaderisasi dan ideologi, organisasi, pemenangan pemilu, komunikasi politik, perempuan dan anak, dan lain sebagainya. Jabatan sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Semarang diemban oleh Kadar Lusman, S. E. dan M. Rukiyanto AB., S. H. selaku bendahara.

2.2.1. Dinamika Politik di dalam Pemilu Legislatif

PDI Perjuangan di Kota Semarang telah menjadi kekuatan dominan dalam dua dekade terakhir. Dominasi PDI Perjuangan ini tercermin dalam capaian konsisten mereka dalam setiap pemilu legislatif. Dalam pemilu legislatif Kota Semarang Tahun 2014 dan 2019, PDI Perjuangan menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kota Semarang. Dalam pemilu legislatif tahun 2024, PDI Perjuangan menghadapi perlawanan dari berbagai partai oposisi. Hal ini secara praktikal dihadapi PDI Perjuangan di tengah kondisi internalnya yang sedang tegang dikarenakan perbedaan kepentingan antar kader. Pada pemilu legislatif tahun 2024, PDI Perjuangan kehilangan 5 kursi anggota dewan dari periode sebelumnya, termasuk di dalamnya adalah hilangnya 50% kursi anggota dewan perempuan. Meskipun PDI Perjuangan secara nasional telah mengadopsi komitmen

terhadap kebijakan afirmatif dengan memenuhi kuota minimal 30% caleg perempuan, realisasinya di Kota Semarang masih menghadapi tantangan.

2.2.2. Profil Perempuan PDIP di DPRD Kota Semarang

Keterpilihan perempuan dalam pemilihan legislatif, merupakan refleksi dari keberhasilan sistem politik dalam menciptakan ruang yang inklusif dan setara. Meskipun secara konstitutif kebijakan kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif telah diterapkan sejak Undang-Undang Pemilu No. 12 Tahun 2003, dalam praktiknya perempuan masih menghadapi tantangan besar untuk dapat terpilih dan menduduki kursi legislatif sebagai anggota dewan. Hal ini secara nyata membuktikan bahwa regulasi afirmasi saja tidak cukup, karena keterpilihan perempuan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari internal partai maupun eksternal. Hal tersebut berkelindan membentuk peluang politik politisi perempuan.

Secara internal, keterpilihan perempuan sangat bergantung pada seberapa besar partai politik memberikan dukungan kepada kader perempuannya, termasuk ruang untuk berkontestasi, dukungan, hingga kepercayaan akan kapabilitas politisi perempuan tersebut. Dalam konteks PDI Perjuangan di Kota Semarang, dukungan struktural partai menjadi penentu awal bagi politisi perempuan untuk bersaing secara kompetitif dalam pemilu. Sebagai contoh dalam peletakan nomor urut yang strategis. Meski secara administratif PDI Perjuangan telah memenuhi kuota 30%, perempuan masih sering ditempatkan di nomor urut yang kurang strategis. Selain itu, ketersediaan sumber daya politik seperti dana kampanye, akses ke jaringan

konstituen, dan pelatihan internal juga turut mempengaruhi kesiapan dan kekuatan caleg perempuan.

Selain itu, faktor eksternal juga memberikan tekanan signifikan kepada caleg perempuan. Dimana dalam kultur masyarakat di Indonesia yang masih patriarkis, politik masih dianggap sebagai arena maskulin yang lebih pantas diisi oleh laki-laki. Perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota dewan sering kali mendapatkan stereotip bahwa mereka kurang tegas, terlalu emosional dan diberikan beban ganda yang mana ranah domestik sebagai urusan perempuan yang utama, sehingga hal tersebut menggerus kepercayaan publik terhadap kemampuan mereka. Sistem pemilu proporsional terbuka juga turut menambah kompleksitas tantangan bagi politisi perempuan, dimana pemilih tidak hanya memilih partai, namun juga politis. Hal tersebut menjadikan caleg perempuan tidak hanya bersaing dengan partai lain, namun juga harus bersaing secara langsung dengan kandidat dari partainya sendiri, yang kebanyakan laki-laki dengan jaringan yang lebih kuat. Media massa, baik lokal maupun nasional juga turut mempengaruhi keterpilihan politisi perempuan. Pemberitaan yang bias gender dan lebih menekankan aspek personal seperti penampilan atau status keluarga daripada gagasan dan visi politik memperkuat persepsi bahwa perempuan dalam politik adalah “aksesori demokrasi”, bukan aktor utama.

Selain itu, dinamika sosial-politik di tingkat konstituen juga berpengaruh. Loyalitas terhadap partai seringkali tidak sejalan dengan loyalitas dengan kandidat perempuannya. Dengan demikian, keterpilihan perempuan dalam politik, khususnya politisi perempuan petahana dari PDI Perjuangan di Kota Semarang

tidak hanya ditentukan oleh kualitas personal atau status petahana semata, namun juga serangkaian faktor struktural dan kultural turut beroperasi di dalam dan luar partai. Dalam pemilu legislatif Kota Semarang tahun 2024, PDI Perjuangan berhasil mempertahankan tiga kursi politisi perempuan sebagai petahana pada DPRD Kota Semarang periode tahun 2024-2029. Ketiga politisi perempuan tersebut adalah Trifena Weyatin Soehendro, Hanik Khoiru Solikhah, dan Lely Purwandari. Ketiga politisi perempuan tersebut tidak hanya mencerminkan keberanian perempuan sebagai individu untuk mengambil peran politik, namun juga upaya PDI Perjuangan dalam mendukung keterwakilan perempuan, meskipun menghadapi dinamika internal partai dan medan politik Kota Semarang yang penuh tantangan. Lebih lengkap, ketiga politisi perempuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Trifena Weyatin Soehendro, S. Kom.

Trifena Weyatin Soehendro merupakan politisi perempuan PDI Perjuangan yang kembali terpilih dalam pemilu legislatif Kota Semarang tahun 2024. Ia maju dari Daerah Pilih (Dapil) Kota Semarang 1, yang meliputi Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Utara, dan Semarang Timur. Dalam kontestasi tersebut, Trifena memperoleh 1.429 suara, sehingga menjadikannya caleg dengan perolehan suara terbanyak di dapilnya.

Gambar 4. Trifena Weyatin Soehendro



Sumber: DPRD Kota Semarang, 2024

Trifena memiliki latar belakang pendidikan di bidang komputer, dengan gelar Sarjana Komputer (S. Kom.). Sebagai anggota DPRD, ia dikenal aktif dalam isu-isu sosial, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan pendidikan. Dalam periode sebelumnya, Trifena duduk di Komisi D yang membidangi kesejahteraan rakyat dan menjadi salah satu figur yang cukup vokal dalam pengawasan kebijakan pendidikan dan layanan publik.

2. Hanik Khoiru Solikhah, S. E.

Hanik Khoiru Solikhah atau akrab disapa Mbak Hanik adalah politisi perempuan dari PDI Perjuangan yang sama, kembali terpilih sebagai anggota DPRD Kota Semarang. Ia maju dari Dapil Kota Semarang 2, yang meliputi wilayah Gayamsari, Genuk, dan Pedurungan. Dalam pemilu 2024 kemarin, Hanik meraih 3.411 suara, menjadikannya sebagai caleg dengan perolehan suara terbanyak di dapilnya.

Gambar 5. Hanik Khoiru Solikhah



Sumber: DPRD Kota Semarang, 2024

Hanik memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi dengan gelar Sarjana Ekonomi (S. E.). Ia dikenal aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, terutama di wilayah pinggiran Kota Semarang yang kerap menjadi kantong suara PDI Perjuangan. Dalam periode sebelumnya, Hanik berfokus pada isu pemberdayaan UMKM, pelayanan publik, hingga ketahanan keluarga.

3. Lely Purwandari

Lely Purwandari kembali terpilih menjadi anggota DPRD Kota Semarang dari PDI Perjuangan mewakili Dapil Kota Semarang 3. Dapil tersebut meliputi 3 wilayah kecamatan, yakni Candisari, Gajahmungkur, dan Banyumanik. Seperti dua politisi sebelumnya, Lely memenangkan kontestasi pemilu legislatif dengan perolehan suara terbanyak, yakni 1.401 suara.

Gambar 6. Lely Purwandari



Sumber: DPRD Kota Semarang, 2024

Lely memiliki latar belakang sebagai aktivis perempuan sekaligus penggiat isu perlindungan anak. Di periode sebelumnya, ia menjabat di Komisi A DPRD Kota Semarang dan dikenal fokus dalam mendorong kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan. Di parlemen, ia vokal mengangkat isu-isu seperti kekerasan rumah tangga, hak anak, serta perlindungan perempuan dari praktik eksploitasi.

Ketiga politisi di atas adalah politisi petahana perempuan yang menunjukkan spektrum representasi perempuan dengan pengalaman legislatif yang panjang. Meski dengan latar belakang yang beragam, mereka menghadapi tantangan yang relatif serupa, yakni dari internal maupun eksternal, secara kultural maupun struktural. Profil dan dinamika keterpilihan ketiga politisi ini menjadi representasi nyata dari kompleksitas keterwakilan perempuan dalam politik lokal, hingga bukti ketangguhan perempuan dalam menghadapi tantangan dalam kontestasi pemilu.